ANALISIS KEMISKINAN

DI PULAU JAWA TAHUN 2010-2016

DISUSUN OLEH:

FRITZ ALPASHA FAISAL PIFATH

14313193

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI

YOGYAKARTA

2019

PENGESAHAN

Analisis Kemiskinan Di Pulau Jawa Tahun 2010-2016

Nama	:	Fritz Alpasha Faisal Pifath
Nomor Mahasiswa	:	14313193
Progam Studi	:	Ilmu Ekonomi

Yogyakarta, 28 Februari 2019

Telah disetujui dan disahkan oleh
Dosen Pembimbing

Ari Rudatin, Dra., M.Si.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kemiskinan di Provinsi Pulau Jawa periode 2010–2016. Provinsi di Pulau Jawa memiliki tingkat kemiskinan yang lumayan tinggi. Dalam penelitian ini faktor–faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan antara lain yaitu, Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Upah Minimum Provinsi, dan Inflasi. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode regresi data panel. Data panel merupakan penggabungan antara data *time series* dan data *cross section*, dalam menggunakan data panel dalam penelitian ini model yang tepat adalah menggunakan model *fixed effect*. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Upah Minimum Provinsi, dan Inflasi bersama–sama berpengaruh signifikan. Secara individu IPM berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan artinya semakin tinggi IPM maka kemiskinan akan turun. Pertumbuhan UMP tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan dikarenakan angka pertumbuhan UMP belum bisa menggambarkan kesejahteraan masyarakat. Inflasi tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Pulau Jawa dikarenakan inflasi di Pulau Jawa termasuk inflasi yang aman.

Kata kunci : Tingkat kemiskinan, IPM, pertumbuhan UMP, Inflasi

1. PENDAHULUAN

Salah satu tujuan pembangunan nasional Indonesia berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial penduduk negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial dan ekonominya. Kesejahteraan umum di Indonesia dapat digambarkan salah satunya berdasarkan tingkat kemiskinan di Indonesia. Terdapat hubungan negatif antara kesejahteraan umum dengan tingkat kemiskinan di Indonesia. Semakin rendah tingkat kemiskinan menggambarkan semakin tinggi kesejahteraan penduduk.

Kemiskinan bisa juga dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Penyebab kemiskinan antara lain adalah karena kurangnya kebutuhan dasar semacam pakaian, makanan, tingkat kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang didapat didasari oleh kurangnya aset dan pendapatan. Keterbatasan lpangan pekerjaan juga terkait dengan kemiskinan dan orang yang mengalami hal tersebut di kategorikan miskin tidak memiliki pekerjaan, serta pada umumnya tingkat kesehatan dan pendidikan mereka kurang memadai. Pembangunan adalah suatu proses yang bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat melalui pembangunan perekonomian. Tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan tingkat kesenjangan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor. Tujuan utama dari usaha

pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, harus juga menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan.

Permasalahan negara berkembang yang sangat sulit ditangani adalah kemiskinan. Indonesia masuk dalam golongan negara berkembang oleh karena itu permasalahan penanganan kemiskinan menjadi pekerjaan utama pemerintah dan menjadi bahan pembelajaran bagi masyarakatnya. Kemiskinan menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi, semakin besar jumlah kemiskinan maka pembangunan ekonomi berkembang kurang baik dan juga sebaliknya.Dampak dari kemiskinan bisa menimbulkan kerawanan sosial dan yang paling parah adalah mengakibatkan munculnya pengangguran. Peristiwa tersebut mengakibatkan banyak tenaga kerja menganggur karena kelebihan angkatan kerja sedangkan lapangan kerja yang tersedia di Pulau Jawa terbatas.

Pada tahun 2011 sebanyak 57.5% penduduk Indonesia berkependudukan di Pulau Jawa atau sebanyak 237.641.326 jiwa penduduk berpusat di Pulau Jawa. Pulau Jawa terdiri dari beberapa provinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Banten. Pulau Jawa sebagai pusat pemerintah dan industrisehingga banyak penduduk memilih untuk tinggal di Pulau Jawa. Hal ini akan semakin cenderung ke tahap kronis jika tidak segera ditangani. Kemiskinan bisa disebabkan oleh berbagai faktor, beberapa faktor tersebut yaitu IPM, pertumbuhan UMP, dan inflasi.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM), menjadi salah satu faktor penting terhadap keadaan tingkat kemiskinan dikarenakan kualitas tenaga kerja dilihat dari kualitas sumber daya manusia nya dan hal itu bisa dilihat dari kondisi IPM di tiap provinsi.Kualitas sumber daya manusia juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya penduduk miskin. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari indeks kualitas hiudp/indeks pembangunan manusia. Rendahnya IPM akan berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Untuk menghasilkan manusia yang berkualitas diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas SDMnya. Adapun kualitas manusia dapat diukur melalui IPM. Peningkatan kualitas manusia dapat dipenuhi dengan berbagai kebijakan, yaitu pembangunan pendidikan juga akan memperhatikan arah pembangunan ekonomi dimasa yang akan datang, pembangunan kesehatan harus mendapat perhatian dengan menanamkan budaya hidup sehat serta memperluas cakupan dan mutu pelayanan kesehatan, untuk penduduk miskin peningkatan kualitasnya dilakukan dengan memberikan keterampilan praktis.Rata–rata presentase IPM di Pulau Jawa mengalami peningkatan dari tahun 2010 yakni bernilai 69.4 menjadi 73.1 pada tahun 2016.

Pertumbuhan Upah Minimum Provinsi, keadaan ekonomi penduduk bisa dilihat dari besarnya upah yang mereka dapat. Seseorang menentukan ingin bekerja juga bisa didasari dari seberapa besar upah yang akan mereka dapat, maka dari itu banyakyang memilih menganggur untuk mencari pekerjaan dengan upah yang sesuai keinginan mereka. Kebijakan upah di Pulau Jawa juga menyesuaikan dengan kondisi inflasi di Indonesia.

Inflasi merupakan indikator kemampuan daya beli masyarakat sebuah negara. Setiap daerah memiliki aturan dan kebijakan berbeda – beda dalam hal ketentuan harga dan sebagainya, yang menimbulkan perbedaan kemampuan daya beli antar masyarakat daerah, mungkin di suatu daerah bisa dikatakan mampu dan berkecukupan, namun bisa jadi jika berada di daerah lain.

2. KAJIAN PUSTAKA

Menurut penelitian oleh Jefti Sidania, Sunlip Wibisono dan Rafael Purtomo S.(2017) yang bertujuan untuk menegetahui pengaruh jumlah penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten. Objek penelitiannya adalah kabupaten di Provinsi Banten periode 2008-2013, dengan olahan data regresi data panel didapat hasil bahwa secara parsial jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran terbuka di Banten,karena peningkatan jumlah penduduk akan meningkatkan angkatan kerja dan tidak diimbangi dengan peningkatan kesempatan kerja. PDRB berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran di Banten, karena PDRB merupakan indikator pertumbuhan ekonomi. UMK berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran di Banten, karena kenaikan UMK bagi pengusaha menyebabkan mereka melakukan efisiensi dengan mengurangi tenaga kerja.

Kemudian, menurut Norman Luther Aruan dan D.Sriyono (2014) dalam jurnalnya bermaksud untuk menganalisa efek dari pertumbuhan ekonomi, upah minimum riil, tingkat inflasi dan variabel dummy berupa inflasi periode krisis ekonomi. Menggunakan Parial Adjustment Model (PAM) sebagai alat analisisnya

Hasil yang didapat hasil bahwa pertumbuhan ekonomi,inflasi dan krisis ekonomi memberikan efek besar terhadap tingkat pengangguran, sedangkan upah minimum riil tidak memberikan efek apapun, karena besarnya perbedaan kondisi sebelum dan sesudah krisis ekonomi tahun 1998.

Kemudian Jurnal karya Ronny Pitartono dan Banatul Hayati (2012) bertujuan menganalisa hubungan antara populasi, inflasi, upah minimum kabupaten, dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran di seluruh Kabupaten Jawa Tengah. Menggunakan metode analisis deskriptif dan korelasi penelitian ini mendapatkan hasil sebagai berikut. Hubungan antara populasi dan upah minimum kabupaten positif dengan tingkat pengangguran, bertambahnya populasi mengakibatkan banyaknya angkatan kerja yang tidak dibarengi dengan penambahan kesempatan kerja, dan upah minimum disebabkan karena perspektif yang digunakan adalah perspektif pengusaha/perusahaan. Inflasi dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Jawa Tengah karena data *time series* yang digunakan penulis masih kurang banyak.

Kemudian penelitian oleh Tengkoe Sarimuda RB dan Soekarnoto (2014) ditujukan untuk menguji pengaruh PDRB, UMK, inflasi, dan investasi terhadap pengangguran terbuka di 29 kabupaten dan 9 kota di Jawa Timur. Melalui regresi data panel didapat hasil bahwa variabel PDRB, UMK, inflasi, dan investasi berpengaruh terhadap pengangguran terbuka di kab/kota di Jawa Timur. Sedangkan dengan metode parsial hanya PDRB dan UMK yang berpengaruh terhadap pengangguran terbuka kabupaten/kota di Jawa Timur. Inflasi tidak berpengaruh karena penyebab inflasi di Jatim bukan dari *demand pull inflation.*

Investasi tidak berpengaruh karena realisasi nya tidak terlalu nyata pada daerah kecil di beberapa kab/kota.

Kemudian penelitian oleh Dicky Wahyudi dan Tri Wahyudi Rejekiningsih (2013) bertujuan untuk menganalisis variabel kesehatan, pendidikan, pengeluaran pemerintah, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Jawa Tengah. Menggunakan data panel estimasiregresi fixed effect hasil diperoleh adanya variabel kesehatan, pendidikan dan pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah. Hal ini berarti setiap peningkatan pada variabel pendidikan, kesehatan dan pengeluran pemerintah akan menyebabkan tingkat kemiskinan turun. Sedangkan untuk variabel pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan. Namun untuk variabel pertumbuhan ekonomi tidak signifikan secara statistik mempengaruhi tingkat kemiskinan, disebabkan oleh fluktuatifnya data atau cenderungnya data menurun.

Kemudian peneltian oleh Anggit Yoga Permana, Fitrie Arianti (2012) yang bertujuan untuk menganalisis variabel PDRB, pengangguran, pendidikan, dan kesehatan terhadap variabel kemiskinan di Jawa Tengah menggunakan estimasi data panel model fixed effect. Hasil yang didapat adalah laju pertumbuhan PDRB, Pendidikan, dan Kesehatan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Jawa Tengah kemudian tingkat pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Jawa Tengah. Dari 34 variabel *dummy* wilayah yang mewakili 34 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengahberpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, artinya masing-masing dari 34kabupaten/kota tersebut memiliki perbedaan perkembangan tingkat kemiskinan. Terdapat

12kabupaten/kota yang memiliki perkembangan tingkat kemiskinan di bawah Kota Semarang(*benchmark*), dan sisanya terdapat 22 kabupaten/kota yang memiliki perkembangan tingkatkemiskinan yang lebih tinggi Kota Semarang.

3. METODE PENELITIAN

Metode analisis yang dipakai di peneltian ini adalah metode kuantitatif dengan data panel, yatiu data yang berbentuk angka. Analisis digunakan untuk menguji secara statistik antar variabel data yang telah dikumpulkan dengan bantuan program Eviews 9. Hasil yang diharapkan nantinya dapat menjawab rumusan masalah dan membuktikan hipotesis. Dalam teori ekonometri, data panel adlah gabungan antara data cross section dan data time series.

Analisis regresi data panel dapat dilakukan dengan tiga metode estimasi, yaitu model estimasi Common Effect, Fixed Effect, dan Random Effect. Pemilihan metode disesuaikan dengan realibilitas antar variabel. Cara yang digunakan untuk memilih antara ketiga model tersebut adalah dengan Uji Chow dan Hausman.

1. Regresi Common Effect

   Common Effect adalah model paling sederhana yang mengamsusikan bahwa tidak ada heterogen antar individu yang tidak terobservasi (intersep sama), karena semua variabel dependen sudah dijelaskan oleh variabel independen.

2. Regresi Fixed Effect

   Fixed Effect diasumsikan bahwa ada keheterogenan antar individu yang tidak terobservasi yang tidak tergantung waktu. Apabila ada

hubungan antar variabel dependen dan independen maka disebut model fixed effect.

3. Regresi Random Effect

   Random Effect lebih memperhitungkan error dari data panel dengan metode least square, pendekatan ini memperbaiki efisiensi proses least square dengan memperhitungkan error data time series dan cross section. Model ini adalah variasi dari estimasi Generalized Least Square (GLS).

Untuk memilih model regresi yang tepat dapat menggunakan beberapa uji tersebut diantaranya adalah.

1. Uji Chow

   Pengujian untuk memilih antara Common Effect dan Fixed Effect yang paling bagus digunakan untuk mengestimasi data. Dengan cara membandingkan nilai F hitung denga F tabel. Hipotesis sebagai berikut

   Ho : Common Efeect

   Ha : Fixed Effect

   Apabila probabilitas F < alpha (0.05) maka Ho ditolak, jika probabilitas F > alpha (0.05) maka Ho diterima.

2. Uji Hausman

   Pengujian dipergunakanuntuk memilih antara Fixed Effect dan Random Effect yang paling tepat digunakan untuk mengestimasi data. Hipotesisnya sebagai berikut.

   Ho : Random Effect

   Ha : Fixed Effect

   Apabila chi-square tabel < chi-square hitung maka Ho ditolak dan model fixed effect lebih tepat.

Uji Statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji t), Uji Koefisien Regresi secara bersama-sama (Uji F), dan Koefisien Determinasi (R-squared).

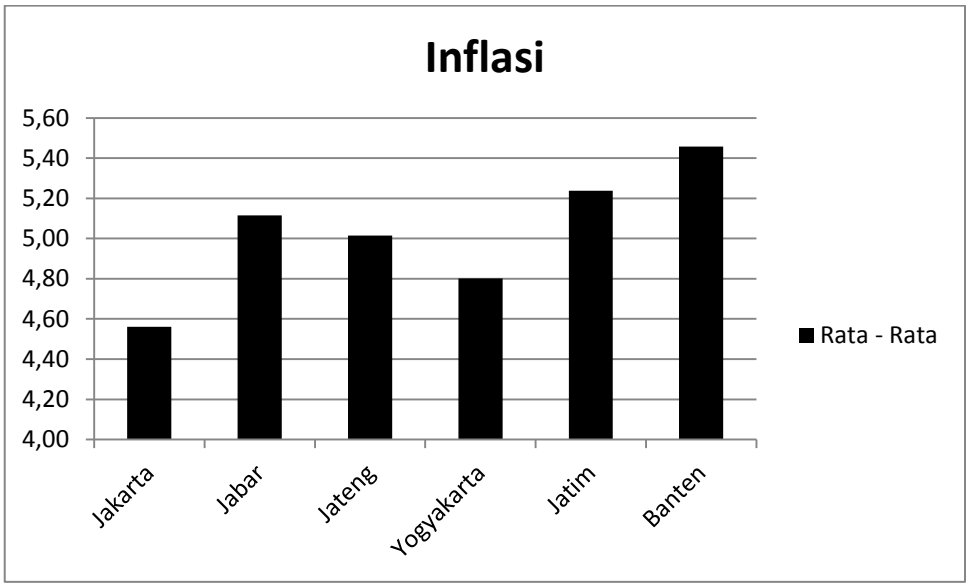
4. HASIL PENELITIAN

Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Kemiskinan. Berdasarkan hasil regresi yang dilakukan, variabel indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif terhadap variabel tingkat kemiskinan. Hal ini sesuai dengan dugaan hipotesis yang diajukan, bahwa IPM mempengaruhi tingkat kemiskinan secara negatif. IPM sendiri adalah indikator kualitas SDM suatu daerah, jika daerah tersebut memiliki IPM yang cenderung tinggi maka keadaan kemiskinan akan rendah, hasil ini berlaku pada kemiskinan di Pulau Jawa. Hal ini membuktikan bahwa kualitas sumber daya manusia diperlukan untuk menurunkan angka tingkat kemiskinan, karena dengan meningkat nya kualitas sumber daya manusia diukur dari IPM maka produktifitas masyarakat akan bertambah dan kualitas hidup masyarakat akan meningkat.

Analisis Pengaruh Pertumbuhan Upah Minimum Provinsi terhadap Tingkat Kemiskinan. Berdasarkan hasil regresi yang dilakukan, variabel pertumbuhan upah minimum provinsi tidak berpengaruh terhadap variabel tingkat kemiskinan. Hal ini tidak sesuai dengan dugaan hipotesis yang diajukan, bahwa UMP akan mempengaruhi tingkat kemiskinan secara negatif. Hal ini dikarenakan angka pertumbuhan upah minimum provinsi belum bisa mendeskripsikan kesejahteraan seseorang untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya, artinya seseorang dengan upah yang tinggi belum tentu bisa disebut sebagai orang yang

berkecukupan karena kebutuhan akan hidupnya juga banyak atau melebihi upah yang didapat. Jadi, diperlukan indikator lebih mendalam untuk menggambarkan kesejahteraan seseorang, karena tingkat kemiskinan diukur dari kesejahteraan masyarakatnya.

Analisis Pengaruh Inflasi terhadap Tingkat Kemiskinan. Berdasarkan hasil regresi yang dilakukan, variabel inflasi tidak berpengaruh terhadap variabel tingkat kemiskinan. Hasil tersebut membuktikan bahwa dugaan hipotesis yang diajukan tidak terbukti. Hal ini dikarenakan inflasi yang terjadi di Pulau Jawa termasuk inflasi yang masih aman dibawah angka 10% dan masih dalam toleransi daya beli masyarakat. Harga barang dan jasa di Pulau Jawa termasuk paling rendah dibanding dengan pulau lain di Indonesia. Dapat dilihat dari grafik dibawah bahwa rata–rata inflasi dari tahun 2010–2016 di Pulau Jawa masih dalam angka dibawah 10%.



Grafik Rata–rata Inflasi

5. Kesimpulan

Berdasarkan alat analisis didapat beberapa hasil penelitian dan pembahasan. Uraian hasil penelitian dan pembahasan tertuang dalam simpulan serta implikasi. Berikut kesimpulan dari peneltitian mengenai tingkat kemiskinan di Pulau Jawa sebagai berikut.

Dari hasil penelitian ini menjelaskan bahwa terjadinya kemiskinan di Pulau Jawa adalah faktor ekonomi yaitu :

1. Variabel IPM mempengaruhi tingkat kemiskinan secara negatif. Hal ini membuktikan bahwa kualitas sumber daya manusia diperlukan untuk menurunkan angka tingkat kemiskinan, karena dengan meningkat nya kualitas sumber daya manusia diukur dari IPM maka produktifitas masyarakat akan bertambah dan kualitas hidup masyarakat akan meningkat.
2. Variabel Pertumbuhan UMP tidak mempengaruhi tingkat kemiskinan. Penyebabnya adalah angka pertumbuhan upah minimum provinsi belum bisa mendeskripsikan kesejahteraan seseorang untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya, artinya seseorang dengan upah yang tinggi belum tentu bisa disebut sebagai orang yang berkecukupan karena kebutuhan akan hidupnya juga banyak atau melebihi upah yang didapat.
3. Variabel inflasi tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Jawa, karena inflasi yang terjadi di Jawa termasuk inflasi yang masih aman dibawah angka 10% dan masih dalam toleransi daya beli

masyarakat. Harga barang dan jasa di Pulau Jawa termasuk paling rendah dibanding dengan pulau lain di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Anggit Yoga Permana dan Fitrie Arianti. 2012. "Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran, Pendidikan, Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Jawa Tengah Tahun 2004-2009." *Jurnal Ekonomi Diponegoro,* Vol.1 No.1.

Badan Pusat Statistik. 2018. Presentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi 2007-2018. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2018 dari https://www.bps.go.id/dynamictable/2016/08/18/1219/persentase-penduduk-miskin-menurut-provinsi-2007---2018.html

_____. 2018. Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2018 dari https://www.bps.go.id/dynamictable/2016/06/16/1211/indeks-pembangunan-manusia-menurut-provinsi-2010-2017-metode-baru-.html.

_____. 2018. Upah Minimum Provinsi/Regional dan Rata-rata Nasional dalam Rupiah 2010-2017. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2018 dari https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1211.

_____. 2018. Inflasi Menurut Provinsi di Pulau Jawa. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2018 dari https://www.bps.go.id

Dicky Wahyudi dan Tri Wahyudi Rejekinigsih. 2013. "Analisis Kemiskinan Di Jawa Tengah." *Jurnal Ekonomi Diponegoro,* Vol.2 No.1.

Jefti Sidania, Sunlip Wibisono, Rafael Purtomo. 2017. "Determinan Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Banten Tahun 2008-2013." *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi,* Vol IV(2) : 169-172.

Norman Luther Aruan dan D.Sriyono. 2014. "Faktor Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun 1985-2011."*Jurnal MODUS* Vol. 26 (2) : 173-187.

Ronny Pitartono dan Banatul Hayati. 2012. "Analisis Tingkat Pengangguran di Jawa Tengah Tahun 1997-2010." *Journal of Accounting* Vol. 1, Nomor 1, Tahun 2012, Halaman 10.

Tengkoe Sarimuda RB dan Soekarnoto. 2014. "Pengaruh PDRB, UMK, Inflasi, dan Investasi Terhadap Pennganggguran Terbuka di Kab/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2007-2011."*Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Tahun XXIV No.2.